

Implementasi Kerangka Aksi Mitigasi Bencana Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Luqman Hidayat

Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Yogyakarta

Email: luqman@upy.ac.id

Abstrak. Pelaksanaan program mitigasi bencana bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi perlu mendapatkan perhatian serius. Anak berkebutuhan khusus merupakan kategori rentan dalam suatu bencana. Kegiatan mitigasi bencana di sekolah inklusi idealnya memuat persiapan prabencana, ketika terjadi bencana, hingga pasca bencana dan adanya evaluasi yang komprehensif yang melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam situasi kebencanaan dalam mempersiapkan warga sekolah termasuk siswa berkebutuhan khusus dalam menghadapi bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan sekolah inklusi dalam rangka mempersiapkan siswa berkebutuhan khusus saat terjadinya bencana di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di sekolah dasar penyelenggara program pendidikan inklusif di Klaten Jawa Tengah terhadap kesiapsiagaan bencana. Sebanyak 8 guru dan 4 siswa menjadi responden dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar guru dan siswa berkebutuhan khusus telah memiliki kecakapan dalam perencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Sekolah Inklusi, Siswa Berkebutuhan Khusus.

Abstract. The implementation of disaster mitigation programs for students with special needs in inclusive schools needs serious attention. Children with special needs are a vulnerable category in a disaster. Disaster mitigation activities at inclusive schools ideally include pre-disaster preparation, when a disaster occurs, to post-disaster and a comprehensive evaluation that involves all school residents and stakeholders in disaster situations in preparing school residents including students with special needs in dealing with disasters. The purpose of this study was to determine the readiness of inclusive schools in order to prepare students with special needs in the event of a disaster at school. This research is a qualitative research with a descriptive approach in primary schools implementing inclusive education programs in Klaten Central Java on disaster preparedness. A total of 8 teachers and 4 students became respondents in the study. Based on the research results, most teachers and students with special needs have skills in planning and preparing for disasters in the school environment.

Keywords: Disaster Mitigation, Inclusive Schools, Students With Special Need.

Pendahuluan

Sekolah Dasar penyelenggara program Pendidikan inklusif sebagai sebuah bentuk pendidikan formal yang menerima anak berkebutuhan khusus dan siswa regular dalam satu tempat. Sekolah dasar penyelenggara Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dan bagian dari sekolah ramah anak. Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa salah satu indikator Sekolah ramah anak mempunyai komponen penting salah satunya adalah sekolah siaga bencana. Namun, banyak sekolah yang belum proaktif mengembangkan kerjasama

dengan lembaga pendidikan dan pemerhati kebencanaan. Di sekolah inklusi terdapat siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas, intelegensi/mental, dan sensori yang memerlukan perhatian lebih dalam kebencanaan. Semakin layaknya akomodasi bagi anak berkebutuhan khusus, semakin baik pula penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Melalui surat edaran Mendiknas No. 70a/SE/MPN/2010 tentang pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, seharusnya sudah dapat menjadi legalitas bagi sekolah inklusi untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang memberikan perlindungan pengurangan risiko bencana. Skenario berbeda harus diterapkan untuk mitigasi bencana antara sekolah umum dan sekolah inklusi atas hadirnya siswa berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa potensi ancaman bencana di Indosia yang sering terjadi misalnya gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dll.

Prinsip dasar Sekolah Ramah Anak atau yang disingkat SRA yaitu nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, penghargaan terhadap pendapat anak dan tata kelola yang baik (Yosada & Kurniati, 2019). Prinsip tersebut dikembangkan dari Konvensi Hak-Hak Anak PBB untuk memastikan semua anak mendapatkan hak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Sekolah Ramah Anak diartikan sebagai sekolah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di pendidikan (Yosada & Kurniati, 2019).

Salah satu indikator hak anak yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak adalah kesiapsiagaan, kesadaran, dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran tanggap bencana, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Lesmana & Purborini, 2019). Kegiatan mitigasi bencana menurut UU Nomor 24 Tahun pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana dapat dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, kesiapsiagaan sekolah dalam mengurangi resiko bencana sangat penting karena banyak sekolah yang berada dalam wilayah rawan bencana (Nasrullah & Reza, 2020). Sekolah inklusi merupakan sistem pelayanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik reguler di

sekolah yang sama (Darma & Rusyidi, 2015). Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada keadaan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional sehingga membutuhkan perlakuan khusus (Ariastuti dkk., 2016). Oleh sebab itu, penyelenggara sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan, baik untuk anak reguler maupun untuk anak berkebutuhan khusus yang salah satunya adalah terselenggaranya sekolah aman bencana. Siswa berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang paling rentan apabila terjadi bencana karena beberapa dari mereka memiliki hambatan mobilitas untuk melindungi dan menyelamatkan diri secara mandiri (Asiyah, 2018). Oleh sebab itu, sangat penting adanya suatu pemahaman sikap dan pengetahuan atas kesiapsiagaan bencana di sekolah inklusi dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang ada pada anak dan prosedur penyelamatan anak berkebutuhan khusus dengan bantuan warga sekolah (Raibowo dkk., 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode kualitatif deskriptif merupakan metode untuk memotret fenomena atau mengeksplorasi situasi yang terjadi secara luas, menyeluruh dan dalam. Sumber data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam memberikan treatment pada siswa berkebutuhan khusus dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kerangka aksi mitigasi bencana yang dimiliki sekolah.

Sebanyak 8 responden guru yang terdiri dari guru kelas, guru pembimbing khusus (GPK) dan kepala sekolah dan 4 siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi dalam wawancara pengetahuan tentang bencana alam, kerentanan fisik (lokasi dan kondisi bangunan), sikap terhadap risiko bencana melalui peran sekolah untuk kesiapsiagaan mengantisipasi terjadinya bencana alam. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen kerangka aksi yang dimiliki sekolah dalam mitigasi bencana, termasuk sumberdaya material dan non material yang dialokasikan dalam kesiapsiagaan bencana di sekolah inklusi serta sarana dan prasarana yang dipersiapkan dalam kesiapsiagaan bencana.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Gledek Karangnom Klaten. Temuan mengungkapkan bahwa guru dan siswa berkebutuhan khusus telah mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam mitigasi bencana mulai dari perencanaan, pada saat terjadinya bencana hingga pasca bencana. Sekolah dasar ini merupakan sekolah penyelenggaraan program pendidikan inklusif yang memiliki visi "Terciptanya Sekolah Ramah Anak yang Berkualitas

Berwawasan Lingkungan Berlandaskan Iman dan Taqwa”, serta memiliki prinsip dasar yang terbuka; cinta lingkungan; menghargai perbedaan; dan anti kekerasan. Segala aktivitas penyelenggaraan sekolah ramah anak di sekolah merupakan domain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten. SD N 2 Gledek Karanganyar Klaten telah membuat rancangan kerangka aksi pelaksanaan mitigasi bencana di lingkungan sekolah yang melibatkan pemangku kebijakan yaitu mulai dari level terendah hingga pada dinas/instansi terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Seluruh sumber daya dilibatkan untuk mengantisipasi potensi yang timbul ketika terjadi sebuah bencana.



Gambar 1. Proses wawancara dengan responden guru

Sejak tahun 2019, SD N 2 Gledek melaksanakan kegiatan mitigasi bencana yang melibatkan seluruh unsur warga sekolah. Bentuk pengelolaan aksi mitigasi bencana sekolah ini dibagi menjadi tiga siklus, yaitu siklus pra bencana, siklus ketika terjadi bencana, dan siklus pasca bencana. Pada siklus pra bencana, sekolah telah menyiapkan aksesibilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang terdiri dari jalur khusus tunanetra dan ramp/jalur landai untuk membantu kursi roda agar mudah bernavigasi. Menurut siswa berkebutuhan khusus aksesibilitas sangat dirasa penting untuk mewujudkan kesetaraan dalam mengakses lingkungan fisik maupun non fisik. Salah satu penyebab kerusakan akibat bencana adalah karena struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan.



Gambar 2. Proses wawancara dengan siswa di kelas

Sekolah telah memastikan konstruksi dan desain bangunan sesuai ketentuan bangunan tahan gempa dan memiliki aksesibilitas sesuai pedoman teknis bangunan sekolah tahan gempa (PERMEN PUPR 29/PRT/M/2006) dan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan (Permen

PUPR Nomor 14/PRT/M/2017). Dalam siklus pra bencana, sekolah mempunyai denah/peta evakuasi untuk mengkomunikasikan informasi penting tentang perencanaan tanggap darurat gedung sekolah. Peta evakuasi memudahkan proses evakuasi penghuni ke tempat yang lebih aman. Peta evakuasi yang telah dibuat mencakup lokasi pintu keluar, titik kumpul, dan peralatan darurat seperti APAR, kotak P3K, dll. Dalam pembuatan, pemasangan hingga sosialisasi tanda jalur evakuasi, pelibatan seluruh warga sekolah secara penuh telah dilaksanakan untuk mengetahui titik kumpul yang disepakati oleh sekolah.



Gambar 3. Ilustrasi keterlibatan siswa dalam siklus pra bencana

Sekolah juga telah memodifikasi peralatan yang ada di ruang kelas/kantor dengan menambahkan pengaman agar lebih stabil ketika terjadi guncangan / gempa bumi dengan diberi penguat yang ditempel pada tembok/lantai. Pada tahap akhir siklus pra bencana, seluruh komponen sekolah mendapatkan sosialisasi dan simulasi bencana dan menjadi agenda rutin tiap tahun. Pelatihan ini melibatkan BPBD dan PMI, serta mengadakan diskusi dengan pemangku kepentingan meliputi perwakilan masyarakat, dinas pendidikan & sosial, instansi kesehatan, dan potensi sumber daya lain dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah.



Gambar 4. Ilustrasi diskusi kesiapsiagaan bencana dengan stakeholder

Persiapan sebelum terjadinya bencana melalui perbaikan aksesibilitas, diskusi, sosialisasi, dan simulasi bencana dilakukan untuk membentuk kecakapan warga sekolah untuk siap menghadapi bencana (Setyaningrum & Rumagutawan, 2018). Siklus kedua dalam rencana aksi tanggap darurat bencana adalah perencanaan pada saat terjadinya bencana, sekolah memberikan pedoman/treatment yang berbeda untuk peserta didik berkebutuhan khusus ketika menghadapi bencana. Treatment khusus ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus ataupun penyelamat yang ingin menyelamatkan siswa berkebutuhan khusus. Potensi masalah yang mungkin timbul pada peserta didik berkebutuhan khusus pada saat evakuasi adalah :

- a. Siswa dengan hambatan fisik & motorik tidak dapat duduk/memosisikan diri secara baik dan tegak, sehingga membutuhkan sabuk pengaman khusus untuk proses evakuasi.
- b. Siswa dengan hambatan penglihatan tidak dapat melihat tim penyelamat, sehingga tim penyelamat harus memberi sinyal kehadiran mereka menggunakan sumber suara (peluit/panggilan).
- c. Siswa dengan hambatan pendengaran tidak dapat mendengar kehadiran tim penyelamat, sehingga memerlukan sinyal lampu sorot dari tim penyelamat.
- d. Siswa dengan hambatan intelektual mungkin tidak mau menanggapi orang yang mereka tidak tahu/kenal, sehingga tim penyelamat perlu membawa anggota keluarga dalam tim penyelamatan.

Selain potensi masalah yang timbul pada saat penyelamatan bencana pada anak berkebutuhan khusus, sekolah telah menyediakan sistem peringatan dini bencana yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus di antaranya bagi anak dengan hambatan pendengaran menggunakan sinyal visual, lampu senter, bendera, peringatan yang ditulis dengan gambar/gerakan. Sinyal dan pesan suara yang keras, jelas dan sederhana (untuk orang yang sulit mendengar namun masih memiliki sisa pendengaran). Sinyal peringatan bagi siswa dengan hambatan penglihatan dengan sinyal pendengaran/audio melalui penguat suara, sirine, radio, drum, dsb. Dalam menghadapi suatu bencana dimanapun, pada akhirnya semua pemangku kepentingan harus bergerak. Menganggap semua manusia adalah sama dalam pemenuhan hak untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif untuk anak berkebutuhan khusus dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tanpa diskriminasi atas nama kemanusiaan dengan hati tulus ikhlas (Ayub dkk., 2019). Hal penting yang harus diperhatikan adalah setiap peserta didik diminta untuk tidak panik pada saat peringatan bencana aktif. Kepanikan akan semakin memperbesar resiko dalam terjadinya suatu bencana (Lesmana & Purborini, 2019). Posisi duduk siswa berkebutuhan khusus juga perlu diatur agar

mudah dalam bernavigasi dan menyelamatkan diri artinya jalur khusus ABK harus steril dari benda yang kemungkinan dapat menghambat laju pergerakan. Misalnya tempatkan siswa dengan kursi roda, tunanetra, dan tunarungu pada barisan paling depan dan dekat dengan pintu/jalur keluar. Selain itu perlu meminimalisasi gangguan lain misalnya jauhkan perabot kelas yang tidak diperlukan yang mungkin dapat menghambat proses penyelamatan diri siswa maupun proses evakuasi.

Keadaan darurat dapat terjadi di mana saja meskipun siswa berkebutuhan khusus dapat mengharapkan bantuan dari orang lain, hal tersebut tidak menjamin suatu keberhasilan, karena ABK memiliki karakteristik yang beragam yang belum tentu orang lain ketahui (Rosida & Adi, 2017). Itulah mengapa penting, seorang ABK untuk melindungi dirinya sendiri agar tetap aman dan selamat jika bantuan tidak kunjung datang. Seorang ABK mungkin mengalami kesulitan mendengar, melihat atau memahami ketidak mampuan dalam mengetahui suatu peringatan bencana secara resmi. Maka dari itu seorang ABK memerlukan suatu rencana berbeda (Aini & Daniah, 2020). Seorang ABK memerlukan suatu rencana pribadi maupun rencana dukungan dari orang lain. Memikirkan sejak dini tentang kebutuban dalam suatu kedaruratan bencana pada diri sendiri merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi agar seorang menjadi lebih siap.

Tahap terakhir dalam siklus rencana aksi mitigasi bencana di sekolah adalah ketika setelah terjadinya bencana, yaitu adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapatkan kecelakaan/cidera sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Tujuan utama pertolongan pertama adalah mempertahankan korban tetap hidup atau terhindar dari maut, membuat keadaan korban tetap stabil, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan dan rasa cemas, hingga menghindarkan dari kecacatan yang lebih parah (Asman dkk., 2020). Guru juga telah dibekali dengan kemampuan dasar medis sederhana seperti membidai, menutup luka dan memberikan trauma healing pada siswa. Melalui kegiatan trauma healing dapat memperingan efek traumatis pasca bencana dan dapat mengembalikan semangat dan mental siswa di setelah terjadinya bencana. Dalam proses trauma healing biasanya dilakukan dengan metode mendongeng, bernyanyi hingga bermain untuk mengalihkan pikiran siswa untuk melupakan kejadian bencana yang mereka alami (Sumasto dkk., 2019).

Ketika semua kondisi lingkungan/bencana telah aman terkendali, apabila terdapat siswa/korban yang memerlukan penanganan yang serius pihak sekolah menghubungi puskesmas, klinik atau rumah sakit terdekat. Sekolah telah menyediakan nomor kontak penting kedaruratan terdiri dari kontak TNI/POLRI,

pemadam kebakaran, PMI, BPBD/Tagana. Namun sekolah juga mempersiapkan apabila terdapat hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut, misalnya terputusnya saluran telepon baik kabel/seluler ketika bencana. Sekolahpun telah mengupayakan perangkat radio komunikasi / Handy Talky untuk berkomunikasi melalui gelombang radio dan menyimpan frekuensi radio dari instansi terkait kedaruratan bencana. Guru dan karyawan sekolah juga turut memasang perangkat peringatan bencana di telepon pintar / smartphone misalnya peringatan dari BMKG. Hal tersebut diupayakan sekolah untuk semakin cepat dan tanggap dalam memperoleh informasi yang akurat Ketika ancaman bencana datang.

Simpulan

Sekolah Dasar Negeri 2 Gledek Karanganom Klaten merupakan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif yang telah mengimplementasikan standar sekolah ramah anak. Salah satu indikator sekolah ramah anak adalah mengimplementasikan sekolah siaga bencana. Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di SD N 2 Gledek Karanganom Klaten merupakan upaya mempersiapkan kecakapan/kompetensi warga sekolah mengenai pra kejadian bencana, pada saat kejadian bencana, dan pasca bencana yang telah tertuang pada kerangka aksi mitigasi bencana sekolah. Tak hanya itu, sekolah juga mampu mengakomodasi sumberdaya manusia diluar lingkungan sekolah dalam kedaruratan bencana secara cepat dan telah melakukan simulasi bencana setiap tahun pada seluruh warga sekolah. Harapan peneliti adalah sekolah ini mampu menjadi sekolah percontohan dalam kesiapsiagaan bencana yang ramah terhadap ABK agar mampu mengakomodasi secara layak seluruh warga sekolah.

Daftar Pustaka

- Aini, N., & Daniah, D. (2020). Efektivitas Media Aplikasi untuk Edukasi Siaga Bencana pada Anak Penyandang Disabilitas (Tuna Rungu). *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(01), 24–28. <https://doi.org/10.33221/jikes.v19i01.406>
- Ariastuti, R., Herawati, V. D., Role, O., & Schools, I. (2016). Optimalisasi Inklusi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38–47.
- Asiyah, D. (2018). Dampak Pola Pembelajaran Sekolah Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01), 69–82. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3480>
- Asman, A., Asman, A., & Alfina, R. (2020). The Model of Trauma Healing Policy for The Tsunami Disaster Mitigation in Padang, Indonesia. *Sumatra Journal of Disaster ...*, 4(2), 212–219. <http://sjdgge.ppi.unp.ac.id/index.php/Sjdgge/article/view/325%0Ahttp://sjdgge.ppi.unp.ac.id/index.php/Sjdgge/article/download/325/249>
- Ayub, S., Kosim, K., Gunada, I. W., & Zuhdi, M. (2019). Model Pembelajaran Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi Di Sekolah Dasar. *ORBITA: Jurnal Kajian, Inovasi Dan Aplikasi Pendidikan Fisika*, 5(2), 65. <https://doi.org/10.31764/orbita.v5i2.1187>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223–227. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Lesmana, C., & Purborini, N. (2019). Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 15–28. <https://doi.org/10.28932/jts.v11i1.1396>
- NASRULLAH, A. Y. U. C., & Reza, M. (2020). Pengembangan Buku Panduan Kegiatan Pembelajaran Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Anak Usia 5-6 Tahun. *PAUD Teratai*, 09(01), 1–12. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paud-teratai/article/view/34329>
- Raibowo, S., Nopiyanto, Y. E., Sutisyana, A., & Prabowo, A. (2021). Workshop Pembuatan Bahan Ajar Kesiapsiagaan Bencana Alam Dalam Bentuk Multimedia Interaktif Bagi Guru Pendidikan Jasmani. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 217–229. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v5i2.2180>
- Rosida, F., & Adi, K. R. (2017). Studi Eksplorasi Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di SD Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.17977/um022v2i12017p001>
- Setyaningrum, N., & Rumagutawan, R. (2018). Tingkat pengetahuan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada kepala keluarga di Dusun Kiringan Canden Jetis Bantul Yogyakarta. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 2(3), 103. <https://doi.org/10.32504/hspj.v2i3.44>
- Sumasto, H., Suparji, Wisnu, N. T., Ngestiningrum, A. H., Setiawan, Sugito, B. H., & Najib, M. (2019). Trauma healing during the earthquake disaster emergency response phase in Lombok, Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 13(4), 1745–1748. <https://doi.org/10.5958/0973-9130.2019.00562.0>
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>